

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI TESIS	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
INTISARI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	25
E. Keaslian Penelitian	26
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 33
A. Teori Keadilan Interaktif (<i>Interactive Justice</i>)	35
B. Teori Tanggungjawab Hukum & <i>Risk Play-Out Limitation</i>	42
 BAB III METODE PENELITIAN	 47
A. Aspek Doktrinal & Bahan Hukum	47
B. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	50
C. Analisis Hasil	51
D. Jadwal Penelitian	52
 BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	 53
A. Kedudukan Direksi dalam Perseroan Terbatas	53
1. Kedudukan Direksi sebagai Organ Perseroan	56
2. Kedudukan Direksi sebagai Wakil Perusahaan	58
3. Kedudukan Direksi sebagai Pengurus Perseroan	60
B. Kedudukan Hukum BUMN	66

C. Hubungan antara Pencegahan Korupsi, GCG, Manajemen Risiko & BJR di BUMN	78
1. Pencegahan Korupsi di BUMN Persero	78
2. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> & Manajemen Risiko di BUMN Persero	82
3. Doktrin <i>Fiduciary Duty</i> pada Direksi di BUMN Persero	86
4. <i>Business Judgment Rule (BJR)</i> di Perseroan dan BUMN	91
5. Pemenuhan BJR Menghapus Aspek Melawan Hukum	102
6. Konsep <i>risk play-out limitation</i> di BUMN Persero	105
D. Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi di BUMN Persero	108
1. Pengaturan Pidana dalam Undang-undang Perseroan Terbatas	108
2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi & Perkara Korupsi di BUMN	109
3. Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	114
a. Sejarah pengaturan korupsi dengan kerugian keuangan negara di Indonesia	114
b. Perkembangan Tafsir Konstitusional Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	115
c. Materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pada KUHP Nasional	123
4. Aspek Melawan Hukum pada Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	124
5. Aspek Kesalahan pada Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	135
6. Alasan Penghapus Pidana pada Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	141
E. Analisa Putusan Tindak Pidana Korupsi di BUMN	144
1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dengan Terdakwa KAREN AGUSTIAWAN, Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero);	149
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pid.Sus/2021 dengan Terdakwa HENDRISMAN RAHIM, Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya dan Putusan 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Ps atas nama Terdakwa SYAHMIRWAN.	160
3. Putusan PN No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., Putusan MA No. 417 K/Pid.Sus/2014 dengan Terdakwa HOTASI DP NABABAN, Mantan Utama PT. Merpati Nusantara Airline.	169

4. Putusan PN No. 60/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020 dengan Terdakwa ZUBAEDI, Mantan Direktur Investasi pada Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur;	187
5. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg dengan terdakwa Ir. MILAWARMA, M.Eng dan Putusan No. 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg dengan terdakwa ANUNG DRI PRASETYA.	206
BAB V PENUTUP	228
A. KESIMPULAN	228
B. SARAN	232
DAFTAR PUSTAKA	236
LAMPIRAN	243

DAFTAR TABEL

Tabel 1	98
Indikator Pemenuhan BJR pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor	
Tabel 2	125
Perbandingan Elemen, Pengertian & Sifat Melawan Hukum	
Tabel 3	137
Pemenuhan Aspek Dapat Dipidananya Seseorang	
Tabel 4	143
Alasan Penghapus Pidana	

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1	6
Klasifikasi Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Perusahaan	
Grafik 2	56
Interpretasi Bainbridge terhadap Teori <i>Nexus of Contract</i> , Coase	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Konstitusi RI:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV/2016 tanggal 25 Januari 2017
4. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 32/PUU-XVII/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 114/PUU-XXII/2024 tanggal 3 Oktober 2024

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 dengan Terdakwa KAREN AGUSTIAWAN, Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero);
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2935 K/Pid.Sus/2021 dengan Terdakwa HENDRISMAN RAHIM, Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya dan Putusan 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Ps atas nama Terdakwa SYAHMIRWAN.
3. Putusan PN No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST., Putusan MA No. 417 K/Pid.Sus/2014 dengan Terdakwa HOTASI DP NABABAN, Mantan Utama PT. Merpati Nusantara Airline.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 K/Pid.Sus/2020 dengan Terdakwa ZUBAEDI, Mantan Direktur Investasi pada Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur; dan,
5. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg dengan terdakwa Ir. MILAWARMA, M.Eng dan Putusan No. 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg dengan terdakwa ANUNG DRI PRASETYA.